

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021.

LKPJ Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021 lebih diarahkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021. Lebih jauh bahwa keberadaan LKPJ sebagai penjabaran dan tahapan proses dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Secara umum, LKPJ Tahun 2021 ini berisikan informasi mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 berikut permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diberikan pada tahun 2021.

Akhir kata, semoga LKPJ Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2021 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kerja serta peningkatan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi .

Jambi, Januari 2021

KEPALA DINAS KEHUTANAN,
Provinsi Jambi

AKHMAD BESTARI, SH,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690404 199103 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR	
ISI.....	ii
DAFTAR	
TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Landasan Hukum.....	1
1.2. Visi dan Misi.....	4
1.3. Gambaran Umum Dinas Kehutanan.....	9
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
2.1 Program dan Kegiatan Tahun 2020.....	29
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	
3.1. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2020.....	33
3.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....	59
3.3 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya.....	63
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
4.1. Tugas Pembantuan	68
4.2. Permasalahan/Hambatan.....	59
BAB IV PENUTUP.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk.....	9
Tabel 2. Pendapatan Negara Tahun 2020.....	11
Tabel 3. Tujuan Dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016- 2021.....	24
Tabel 4. Arah Kebijakan Dinas kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021....	25
Tabel 5. Strategi dan Kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016- 2021.....	26
Tabel 6. Program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020....	29
Tabel 7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.....	33
Tabel 8. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.....	35
Tabel 9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.....	35
Tabel 10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.....	36
Tabel 11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.....	36
Tabel 12. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.....	36
Tabel 13. Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan.....	38
Tabel 14. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan.....	40
Tabel 15. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan.....	42
Tabel 16. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020.....	44
Tabel 17. Kebijakan Strategis.....	59
Tabel 18. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya.....	63
Tabel 19. Penerimaan Sumber Daya Hutan.....	66
Tabel 20. Dana Reboisasi.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan LKPJ Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020 mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 14); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014, Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;

24. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
25. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
26. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
27. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Di dalam perumusan Rencana Strategis, penetapan visi, misi dan tujuan perlu dilakukan. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan pemerintah Provinsi Jambi. Sebagaimana diketahui bahwa Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Masa Bakti Tahun 2016-2021 yaitu :

“Terwujudnya Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2016-2021”

- Tertib** : Diartikan sebagai wujud tata kelola pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan harmonis yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum, serta terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa.
- Unggul** : Menggambarkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.
- Nyaman** : Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, tenteram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar Suku, Agama dan Ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.

- Tangguh** : Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global, berkembangnya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- Adil** : Mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Sejahtera** : Mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik**, yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat.
- 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender**, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis.
- 3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.
- 4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan**, yaitu meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan.
- 5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan**, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah.

6. **Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat**, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi di atas, maka Tujuan pembangunan daerah provinsi Jambi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan (2016-2021), sebanyak 9 (sembilan) tujuan yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan kualitas SDM perempuan dan SDM yang berbudaya dan agamis.
4. Mewujudkan ketertiban umum daerah.
5. Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN.
6. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian tanaman pangan.
7. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum.
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
9. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Adapun Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, sebanyak 21 (dua puluh satu) Sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik.
3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
4. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah.
5. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan.
6. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya.
7. Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama.
8. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan hukum.
9. Meningkatnya stabilitas demokrasi di daerah.
10. Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP).
11. Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah.
12. Meningkatnya ketahanan pangan.
13. Meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan.
14. Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian.

15. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik.
16. Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi.
17. Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang dengan dampak lingkungan yang minimal.
18. Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi.
19. Menurunnya angka kemiskinan.
20. Menurunnya angka pengangguran.
21. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.

1.3 DATA UMUM DAERAH

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Secara geografis Provinsi Jambi terletak antara 00°45' sampai 20°45' Lintang Selatan dan antara 1010°10' sampai 1040°55' Bujur Timur. Kemudian sebelah Utara Provinsi Jambi berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, selanjutnya sebelah sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, adapun sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu.

Luas total wilayah Provinsi Jambi adalah 53.435 km² dengan luas total daratan adalah 50.160,05 km² dan luas perairan sebesar 3.274,95 km². (Sumber BPS 2019).

1.3.2 Jumlah Penduduk

Berdasarkan *Jambi Dalam Angka 2019*, berikut disampaikan Jumlah Penduduk berdasarkan tiap-tiap daerah :

Tabel 1. Jumlah Penduduk

No	Kabupaten/Kota	Luas (KM ²)	Jumlah Penduduk (Orang)
1	Kerinci	3.355,27	239.606
2	Bungo	4.659,00	394.174
3	Merangin	7.679,00	307.585
4	Sarolangun	6.184,00	275.504
5	Batanghari	5.804,00	454.524
6	Muaro Jambi	5.326,00	221.619
7	Tanjung Jabung Timur	5.445,00	339.286
8	Tanjung Jabung Barat	4.649,85	360.193
9	Tebo	6.461,00	382.311
10	Kota Jambi	205,43	611.353
11	Kota Sungai Penuh	391,50	91.739

(Sumber BPS 2019)

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk hasil Sensus penduduk (SP-2010) selama sepuluh tahun terakhir (2000-2010) sebesar 2,56 persen lebih tinggi dibanding tahun 1990-2000 yang hanya sebesar 1,77 persen. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 25,27 persen dan terendah di Kabupaten Kerinci sebesar 3,31 persen, sedangkan laju penduduk Provinsi Jambi hasil proyeksi tahun 2018 mencapai 1,67 persen, dengan jumlah penduduk sebesar 3,57 juta penduduk.

Dengan luas wilayah sekitar 50.160 km² (daratan), setiap km² ditempati penduduk sebanyak 72 orang pada tahun 2018. Angka ini selalu meningkat pada tahun 2018 yaitu sebesar 70,89 tahun. Angka ini merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup dan merupakan salah satu indikator penting dalam penghitungan IPM. (Sumber BPS 2019).

1.3.4 Jumlah PNS

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kehutanan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi didukung sumber daya yang tersebar dalam Instansi Induk (Dinas Kehutanan) dan UPTD KPHP/TAHURA.

Sebagai pelaksana dan menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Jumlah pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebanyak 427 pegawai yang terdiri dari 60 pejabat struktural, 74 pejabat fungsional tertentu, 40 pejabat fungsional penyuluh kehutanan, 2 pejabat fungsional pengendali ekosistem hutan dan 188 pejabat fungsional umum yang terbagi di Instansi Induk (Dinas Kehutanan Provinsi Jambi) sebanyak 110 pegawai terdiri dari 21 orang pejabat struktural, 18 pejabat fungsional tertentu (2 pejabat fungsional pengendali ekosistem hutan, 16 pejabat fungsional polisi kehutanan) dan 71 orang fungsional umum.

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Realisasi Penerimaan PSDH dan DR tahun 2020 sebesar Rp.52.650.269.516,00 (135,25%) dan Rp.14.810.891.517,00 (350,82%) dari target yang di tentukan Rp.38.929.230.242,00 dan Rp.4.221.824.423,00 (Kep.Men-LHK No.723/MenLHK/Setjen/Keu.1/9/2019).

Realisasi Penerimaan Retribusi kunjungan Wisata Taman Hutan Kenali Pal 11 Tahun 2020 sebesar Rp. 38.574.500 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.30.000.000 (Tim TAPD) Provinsi Jambi.

Tabel 2. Pendapatan Negara Tahun 2020

No	Pendapatan Negara	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)
1	PSDH	38.929.230.242,00	52.650.269.516,00
2	DR	4.221.824.423.00	14.810.891.517,00
3	Retribusi Taman Hutan Kenali (THK)	30.000.000,00	39.124.500,00

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memperoleh anggaran APBD Provinsi Jambi sebesar **Rp. 57.872.631.450,65**, dengan rincian Belanja tidak langsung sebesar **Rp. 49.140.578.732.052.797,-** belanja langsung sebesar **Rp. 8.732.052.797,-**, untuk mendanai **9** Program dan **103** Kegiatan, terdiri dari **5** program rutin mencakup **31** kegiatan dan **4** program teknis mencakup **77** kegiatan. Realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **8.598.010.682,- (98,46%)** Fisik 99,8 %.

1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dari belanja tidak langsung sebesar **Rp. 57.872.631.450,65** terealisasi sebesar **Rp. 49.140.578.653,65** dan dari anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 8.732.052.797,-**, terealisasi sebesar Rp. **8.598.010.682,- (98,46%)** dan Fisik 99,8 %.

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

2.2 Program dan Kegiatan Tahun 2020

Pada tahun 2020, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tetap mengacu pada Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Keseluruhan program maupun kegiatan diupayakan untuk mengakomodir pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 37 Tahun 2016 fokus pada aspek Merumuskan kebijakan teknis di bidang Kehutanan, Pelaksanaan Kegiatan pengelolaan hutan di Provinsi Jambi, Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Provinsi Jambi, Pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi Jambi dan pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan, Pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Lintas Kabupaten/Kota dan dalam Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, Pelaksanaan koordinasi kehutanan dengan instansi terkait lainnya bidang kehutanan, Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya, Oleh karena itu program maupun kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020 merupakan program/kegiatan prioritas yang telah disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021.

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dari alokasi anggaran untuk Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebesar Rp 15.984.368.491,- (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) yang diarahkan untuk mendanai 9 (sembilan) program dan 103 kegiatan.

Mempedomani Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 serta Instruksi Gubernur Jambi Nomor 002 Tentang Refokusing-Realokasi Kegiatan dan Perhitungan Pergeseran Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, ditetapkan pemotongan anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menjadi sebesar Rp. 8.732.052.797 yang artinya mengalami pengurangan sebesar 45,37% yang berdampak pada berkurangnya target kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan.

3.1.1 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020

A. PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN

Keberhasilan dari program ini adalah :

Capaian penerimaan negara melalui PNBPN yaitu :

- a. Penerimaan Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp. 52.650.269.516,- dari target Rp. 38.929.230.242,- (135,24 %).
- b. Dana Reboisasi (DR) Rp. 14.810.891.517,- dari target Rp.4.221.824.423,- (350,8%).

B. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN

Keberhasilan dari program ini adalah:

Capaian penerimaan dari retribusi daerah sebesar Rp. 39.124.500.- dari target Rp. 30.000.000,- (30,4%).

C. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

Keberhasilan dari program ini adalah :

Penurunan kebakaran hutan dan lahan yaitu -79,5 % dari target 5 %.

D. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Keberhasilan dari program ini adalah :

- a. Penyediaan bibit tanaman kehutanan yang berkualitas sebanyak 10.000 batang (kemiri, tembesu, bulian, mangga, kelengkeng, durian daun, tempuni dan tampui)
- b. Peningkatan tutupan lahan kritis atas dukungan berbagai pihak yaitu 0,28 % dari target 0,1 %.

Tabel 3. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Kehutanan
Provinsi Jambi Tahun 2020

Bidang	Dinas	Kebijakan	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Kehutanan	Dinas Kehutanan								
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pengadaan Benda Pos dan Pengiriman Surat	100%	100 %	-	-	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pembayaran Tagihan Air, Listrik dan Telepon	100%	86,63%	Karena gedung ex-BIPHUT yang biasa dipakai terhitung 1 Agustus 2020 gedung tersebut kita serahkan ke Koordinator UPT Pusat atau BPDAS	-	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Honor PNS dan Non PNS	100%	100 %	-	-	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran Jasa Pihak ke-3 Outsourcing Cleaning Service	100%	100%	-	-		

		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Penyediaan Alat Tulis Keperluan Kantor dalam Setahun	100%	100%	-	-	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak Blanko dan Fotocopy	100%	83,26%	Karena adanya selisih harga antara harga umum dan harga standar biaya	Melaksanakan survey harga sebelum penganggaran	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan komponen Penerangan Kantor dalam Setahun	100%	100%	-	-	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dalam setahun	100%	100%	-	-	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Penyediaan Konsumsi Rapat dan Tamu dalam Setahun	100%	71,99%	Keg. Makan minuman rapat tamu tidak digunakan karena adanya wabah COVID-19 dan dibatasinya rapat-rapat yang dilaksanakan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	-	

		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100%	100%	-	-	
		Operasional Rutin UPTD KPHP Unit I Kerinci	Persentase Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor Lainnya dalam Setahun	100%	100%	-	-	
		Operasional Rutin UPTD KPHP Unit II dan III Bungo	Persentase Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor Lainnya dalam Setahun	100%	100%	-	-	
		Operasional Rutin UPTD KPHP Unit IV, V dan VI Merangin	Persentase Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor Lainnya dalam Setahun	100 %	100%			
		Operasional Rutin UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor Lainnya dalam Setahun	100%	100%	-	-	
		Operasional Rutin UPTD KPHP Unit	Persentase Penyediaan ATK, Penggandaan	100%	100%	-	-	

		VIII Hilir Sarolangun	dan Keperluan Kantor Lainnya dalam Setahun					
		Operasional Rutin UPTD KPHP Unit IX Tebo Barat	Persentase Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor Lainnya dalam Setahun	100%	100%	-	-	
		Operasional Rutin UPTD KPHP Unit X Tebo Timur	Persentase Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor Lainnya dalam Setahun	100%	100%	-	-	
		Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XI dan XII Batanghari	Persentase Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor Lainnya dalam Setahun	100%	100%	-	-	
		Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XIII Muaro Jambi	Persentase Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor Lainnya dalam Setahun	100%	100%		-	
		Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	Persentase Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor Lainnya dalam Setahun	100%	100%	-	-	

		Operasional Rutin UPTD KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	Persentase Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor Lainnya dalam Setahun	100%	100 %			
		Operasional Rutin UPTD TAHURA	Persentase Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor Lainnya dalam Setahun	100%	100%	-	-	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	100%	-	-	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Gedung Kantor yang diperbaiki	100%	100%	-	-	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dalam Setahun	100%	100%	-	-	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Peralatan Kantor dalam Setahun	100%	100%	-	-	
		Pengadaan Pakaian	Persentase	100%	100%	-	-	

		Dinas Beserta Perlengkapannya	Penyediaan Pakaian Dinas Untuk ASN Dinas Kehutanan					
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase Fasilitasi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	74,80%	Tidak ada undangan dari penyelenggara untuk menyelenggarakan kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah karena wabah Covid-19	-	
		Peningkatan Sumber Daya Pengelolaan Penatausahaan Keuangan dan Aset	Persentase Pengelolaan Keuangan	100%	100%	-	-	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penajaman Anggaran dan Pengumpulan Data Dukung di UPTD	100%	100%	-	-	
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Pelaksanaan Rapat Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Triwulan	100%	100%	-	-	
		Pengembangan	Jumlah IUPHHK-	4 IUPHHK-HTI	4 IUPHHK-	-	-	

		Hutan Tanaman	HTI yang dilaksanakan Monitoring/Evaluasi/Pemeriksaan Pemenuhan Kewajibannya		HTI			
		Pendampingan kelompok usaha perhutanan sosial	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Izin Perhutanan Sosial	10 Pemegang Izin	10 Pemegang Izin	-	-	
			Jumlah Pembinaan Pemegang Izin Perhutanan Sosial	5 Pemegang Izin PS	5 Pemegang Izin PS			
			Jumlah Fasilitas Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial	10 Kelompok Perhutanan Sosial	10 Kelompok Perhutanan Sosial			
		Pengembangan	Jumlah Monitoring Pembinaan	4 HT/HA Industri dan Hutan Hak.	4 HT/HA Industri dan	-	-	Agar dalam

			Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	IUPHHK HT/HA, IUPHHK dan Hutan Hak yang sudah Menggunakan Aplikasi Online untuk Penatausahaan Hasil Hutan Kayu	PNBP 100%	Hutan Hak. PNBP 100%			penyajian LKPJ tidak hanya menyampaikan keberhasilan capaian program dan kegiatan, tetapi harus didukung dengan data yang lengkap dan rinci berapa target yang ditetapkan, bagaimana perbandingan dengantahun sebelumnya dan dari darimana saja potensi sumber PAD sektor Kehutanan.
			Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan.	Jumlah Monitoring Pembinaan IUPHHK HT/HA, IUPHHK dan Hutan Hak yang sudah Menggunakan Aplikasi Online untuk Penatausahaan	4 IUPHHK	4 IUPHHK	-	-	

			Hasil Hutan Kayu					
		Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	Jumlah Pemohon Izin HHBK yang difasilitasi	1 Pemohon	1 Pemohon	-	-	
			Jumlah Pemegang Izin HHBK yang dimonitoring/dievaluasi	1 Izin HHBK	1 Izin HHBK	-	-	
			Jumlah Pengelolaan Potensi HHBK di UPTD KPHP	1 UPTD KPHP	1 UPTD KPHP	-	-	
		Pemanfaatan dan pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit I Kerinci	Jumlah KTH yang dibina dalam Pengelolaan Hutan secara Lestari Pasca Bantuan Alat Ekonomi Produktif	2 KTH	2 KTH	Pada proses pengurusan izin PS masih kurang penyampaian informasi mengenai kewajiban PNBK sehingga kelompok kurang memahami secara keseluruhan mengenai kewajiban pemegang izin perhutanan sosial	Beberapa kelompok pemegang izin, seperti 4 KTH di HKm Tamial dan 1 KTH di HTR Sungai Galampah sudah dibantu sampai proses pembuatan NPWP KTH secara Online, dan Pembuatan akun SI-PNBK dan SIPUHH, namun tahapannya masih berjalan karena prosesnya cukup panjang	

			Jumlah Pemegang Izin yang dimonitor dan dibina terhadap Pembayaran PNBP	4 Kali	4 Kali	Untuk memenuhi kewajiban pembayaran PNBP, masih kurangnya kemampuan masyarakat dalam pembuatan akun SI-PNBP dan SIPUHH Online yang mewajibkan pendaftaran secara online, pemegang izin belum memiliki tenaga operator yang mumpuni	Hampir semua pemegang izin berkomitmen memenuhi kewajiban PNBP membayar IUPHH serta PSDH	
			Jumlah Pengembangan Pengujian Peredaran Hasil Hutan	1 Kasus	1 Kasus	Dalam pengisian SI-PNBP dibutuhkan data potensi yang tertuang dalam RKU dan RKT, pemegang izin belum memiliki data dimaksud	Harus ada sosialisasi secara berkesinambungan tentang PNBP	
	Pemanfaatan dan pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit II dan III Bungo	Jumlah Monitoring dan Fasilitasi PNBP dan PAD sektor Kehutanan dalam Setahun	2 Kali	2 Kali	Jumlah subyek pemanfaatan hasil hutan yang memiliki potensi PNBP dan PAD dalam wilayah kerja KPHP Bungo sebanyak IUPHHK HTI-2			
		Jumlah Pemantauan dan Pembinaan Pemanfaatan	2 Kali	2 Kali	HTI-2, IUPHHK HD-7, IUPHHK HTR-3, IUIPPKH-2, Pemanfaatan			

			Hutan dalam Setahun			Hutan Tanak Milik 8 Lokasi		
			Jumlah Pengembangan Pengujian Pengendalian Hasil Hutan dalam Setahun	1 Kali	1 Kali			
			Jumlah Fasilitas Kerjasama dan Kemitraan	1 Kali	1 Kali			
	Pemanfaatan dan pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit IV, V dan VII Merangin		Jumlah Pembinaan dan Monitoring Izin yang difasilitasi	5 kali	5 kali	-	-	-
			Jumlah Monitoring Peredaran Hasil Hutan yang difasilitasi	2 kali	2 kali			
			Jumlah Fasilitas Kerjasama dan Kemitraan (KTH) yang difasilitasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
			Jumlah Fasilitas PNBP dan PAD Sektor Kehutanan	1 berkas	1 berkas			

		Pemanfaatan dan pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Jumlah Laporan Optimaslisasi Pemanfaatan Hasil Hutan	1 Laporan	1 Laporan	Kurangnya keterlibatan KPH dalam penerbitan Perizinan (IPKR, Izin HHBK dll) pengurusan SIPUHH berada di BPHP sehingga terkendala dalam monitoring izin-izin dalam wilayah KPH	Telah dilakukan koordinasi ke BPHP Wilayah IV Jambi dan permintaan data rekonsiliasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	
		Pemanfaatan dan pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Jumlah Pemegang Izin yang dimonitor dan dibina terhadap Pembayaran PNB	8 Izin	8 Izin	-	-	
		Pemanfaatan dan pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat	Jumlah Pemegang Izin yang dimonitor dan dibina terhadap Pembayaran PNB	4 Izin	4 Izin	Masih rendahnya masyarakat yang berada dalam izin konsesi untuk bermitra dengan pemegang izin	Perlu dilakukan sosialisasi tingkat tapak	
			Jumlah Pemegang Izin yang dimonitoring dan dibina terhadap Pemanfaatan Hutan dalam	2 Izin	2 Izin			

			Pengembangan Potensi Pengelolaan Hutan Secara Lestari					
		Pemanfaatan dan pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit X Tebo Timur	Jumlah Fasilitas Kemitraan Kehutanan 5 Kelompok di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	3 kali	3 kali	Terbatasnya sarana dan Prasarana kegiatan	Dalam penyusunan anggaran kedepannya agar disesuaikan dengan standar kegiatan teknis	
			Jumlah Monitoring dan Pembinaan Terhadap Pembayaran PNBP pada Pemegang Izin	5 kali	5 kali			
			Jumlah Monitoring dan Pengembangan Pegujian Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	2 kali	2 kali			
		Pemanfaatan dan pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari	Jumlah Monitoring dan Fasilitas PNBP dan PAD sektor Kehutanan	3 Laporan	3 Laporan			

			Jumlah Monitoring dan Pemantauan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atau Izin Penggunaan Kawasan Hutan	3 Laporan	3 Laporan			
			Jumlah Fasilitas Kerjasama dan Kemitraan Kehutanan	1 Kemitraan	1 Kemitraan	Rasionalisasi Anggaran	Upaya pengajuan kegiatan sesuai dengan perencanaan	
			Jumlah Monitoring Pengendalian Pengujian dan Peredaran Hasil Hutan	1 Laporan	1 Laporan	Kurangnya keterlibatan KPHP dalam penerbitan perizinan pemanfaatan kayu dari Hutan Hak, Pengurusan SIPUHH berada di BPHP sehingga terkendala dalam monitoring izin-izin dalam wilayah KPH	Telah dan akan dilakukan koordinasi secara intensif dan kontinu ke BPHP Wilayah IV Jambi dan permintaan data rekonsiliasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	

			Pemanfaatan dan pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XI dan XIII Muaro Jambi	Jumlah Industri yang dibina	5 Industri	5 Industri			
				Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang diawasi	5 Industri	5 Industri	Terbatasnya sarana dan prasarana kegiatan	Dalam penyusunan anggaran kedepannya agar disesuaikan dengan standar kegiatan teknis	
				Jumlah Industri Penatausahaan Hasil Hutan, Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan yang diawasi	5 Industri	5 Industri			
			Pemanfaatan dan pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	Jumlah Pemanfaatan dan Pengembangan Hasil Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	2 Kelompok	2 Kelompok			

			Jumlah Monitoring dan Fasilitasi PNPB dari Pemegang Izin	5 Kali	5 Kali			
			Jumlah Fasilitasi Kerjasama dan Kemitraan	2 Kelompok	2 Kelompok			
	Pemanfaatan dan pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XI dan XV, XVI, XVII Tanjung Jabung Barat		Jumlah Monitoring yang difasilitasi	2 Kali	2 Kali	-	-	
			Jumlah Pemantauan Izin di Areal KPHP/KPHL yang difasilitasi	2 Kali	2 Kali			
			Jumlah Rapat Kerjasama dan Kemitraan yang difasilitasi	1 Kali	1 Kali			
	Pemanfaatan dan pengembangan Potensi Hasil Hutan di UPTD Tahura		Jumlah Fasilitasi Kerjasama dan Kemitraan	1 Kemitraan	1 Kemitraan			

		Perencanaan Kegiatan Pengelolaan KPH, KPHL	Jumlah Peta Informasi Kehutanan Berbasis Geospasial Digital sebagai Bahan Penyusunan Rencana dan Evaluasi Pembangunan Kehutanan	0 Peta	0 Peta			
			Jumlah Dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Perluasan Akses Layanan Informasi Pemasaran Hasil Hutan	Jumlah Pelaksanaan Pameran dan Update Data Pembangunan Kehutanan pada Website	2 kali Pameran	2 Kali Pameran	-	-	
		Pemantapan dan Evaluasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca	Jumlah Rapat Koordinasi Pertemuan RAD GRK per UPTD KPHP	2 Kali	2 Kali	-	-	

			Jumlah Rapat Koordinasi Keluar Daerah Terkahir Pelaporan RAD GRK	1 Kali	1 Kali			
		Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit 1 Kerinci	Jumlah Update Data Pembangunan Kehutanan	6 Sistem Informasi	6 Sistem Informasi	-	-	
		Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit II dan III Bungo	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kehutanan	1 Dokumern	1 Dokumern	-	-	
			Jumlah Perluasan Akses dan Informasi	1 Laporan	1 Laporan			
		Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin	Jumlah RPHJP yang disusun dan difasilitasi	1 Paket	1 Paket	-	-	
			Jumlah Inventarisasi/Cek Potensi jasa Lingkungan HHBK yang difasilitasi	1 Kali	1 Kali			
		Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Jumlah Laporan Perluasan Akses Pengelolaan Hutan dan Akses Informasi	1 Laporan	1 Laporan	Kendala pengajuan pertriwulan yang tidak sesuai dengan perencanaan	Upaya pengajuan anggaran kegiatan sesuai dengan perencanaan	
						Akibat pandemi Covid-19 menyebabkan dibatalkannya	Promosi produk KTH dilakukan dengan strategi pelaksanaan	

						Sarolangun Expose sebagai Agenda Rutin Tahunan Kabupaten Sarolangun sebagai wadah KPH untuk mempromosikan produk-produk KTH dan HHBK dalam wilayah kerja KPH Limau	secara mandiri oleh KPH	
		Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Jumlah Pemegang Izin yang dimonitoring dan dibina terhadap Pemanfaatan Hutan dalam Pembangunan Potensi Pengelolaan Hutan Secara Lestari	2 Izin	2 Izin	-	-	
		Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat	Jumlah Pemegang Izin yang dimonitoring dan dibina terhadap Pemanfaatan Hutan dalam Pembangunan Potensi Pengelolaan Hutan Secara Lestari	2 Izin	2 Izin	Adanya keterlanjuran masyarakat yang menggarap pada areal kawasan hutan	Memberikan legalitas kepada masyarakat melalui kegiatan perhutanan sosial	
			Jumlah Pemahaman Masyarakat terhadap Kawasan Hutan	1 Desa	1 Desa	Belum adanya data inventarisasi jenis tanaman lahan masyarakat pada	Perlunya dilakukan pendataan (Inventarisasi) jumlah persentase jenis	

						kawasan hutan	tanaman masyarakat	
		Jumlah Izin Perhutanan Sosial	1 Izin	1 Izin				
	Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit X Tebo Timur	Jumlah Monitoring Pelaksanaan/ Penyusunan RKT/ Target Tahunan	1 Kali	1 Kali				
		Jumlah Penandaan Batas Perhutanan Sosial	1 Kali	1 Kali				
		Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Informasi	3 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi				
	Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari	Jumlah Fasilitas Penandaan Tanda Batas IUPHH Perhutanan Sosial	2 IUPHHK-PS	2 IUPHHK-PS	Berhubung adanya rasionalisasi anggaran terkait penanganan wabah Covid-19 maka terjadi perubahan anggaran dan pengajuan per triwulan yang tidak sesuai dengan perencanaan	Upaya pengajuan anggaran kegiatan sesuai dengan perencanaan		
		Jumlah Fasilitas Pengecekan Hasil Cruising pada IUPHH Perhutanan Sosial	3 IUPHH-PS	3 IUPHH-PS				
	Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi	Jumlah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dipantau	2 IPPKH	2 IPPKH	Sempat terkendala Perjalanan Dinas Luar Daerah karena adanya	Perjalanan Dinas Luar Daerah tetap dapat dilaksanakan dengan		

							wabah Covid-19	menerapkan protocol kesehatan penanganan wabah Covid-19	
			Jumlah Lokasi Kawasan Hutan yang diokupasi Pihak Ketiga dan yang dimonitoring	2 Lokasi	2 Lokasi				
			Jumlah Rencana Kerja Kegiatan dan Program kerja Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	Jumlah Pelacakan Batas Luar Kawasan Hutan	10 Km	10 Km				
			Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan Oleh Pemegang Izin (HD, HKm, IUPHHK-HTI, IPPKH)	1 kali	1 kali				
		Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit	Jumlah Inventarisasi Hutan yang difasilitasi	1 Kali	1 Kali				

		Xv, xvi dan XVII Tanjung Jabung Barat						
			Jumlah Rapat Tata Kelola Hutan yang difasilitasi	1 Kali	1 Kali	Adanya pemangkasan anggaran karena covid-19 Adanya Keterbatasan SDM	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan SDM setelah pemangkasan Anggaran	
		Pengelolaan Kawasan Hutan di UPTD Tahura	Jumlah Tata Kelola Wilayah Kawasan Hutan	1 tahun	1 tahun	Keterbatasan Sarana dan Prasarana seperti kendaraan Roda 2 (dua), roda 4 (empat) maupun kendaraan Air pada saat pelaksanaan kegiatan	Melakukan rental atau sewa kendaraan saat pelaksanaan kegiatan	
		Pengelolaan Hutan Kenali	Jumlah Luas Hutan Kenali yang dipelihara	10 Ha	Taman Hutan Kenali seluas 10 Ha yang terpelihara	-	-	
				1 Unit embung	Tidak terealisasi	Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19	Penghapusan dalam dokumen DPA 2020	
				Penerimaan Restribusi Daerah Rp. 30.000,000-	Realisasi Penerimaan Retribusi Rp.39.124.500,-			

			Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Monitoring SDM dan Sarpras Pengendalian Karhutla	6 UPTD KPHP dan 7 Perusahaan	6 UPTD KPHP dan 7 Perusahaan	-		Dinas Kehutanan perlu membuat dan kebijakan langkah-langkah strategis dan teknis bagi mana mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tahun-tahun yang akandatang.
			Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	Jumlah Pelaksanaan Patroli Pengamanan	10 Kali	10 Kali	Sebagian lokasi Kawasan hutan ada yang dirambah/diopukasi oleh masyarakat. Adanya konflik antara	Melakukan patrol rutin, sosialisasi, mediasi serta penegakan hukum..	Dinas kehutanan perlu membuat

				Hutan dan Peredaran Hasil Hutan			masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemegang izin dan masyarakat dengan masyarakat pendatang (eksodus).		kebijakan antisipatif dalam rangka mengurangi permasalahan yang muncul pada pelaksanaan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan terutama pada lokasi konservasi yang jauh dan penegakan hukum yang sangat lemah, kurangnya
--	--	--	--	---------------------------------	--	--	---	--	--

									sarana dan prasarana, anggaran patroli yang belum memadai dan kurangnya personil Polisi Hutan (Polhut)
			Jumlah Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan	9 Kali	9 Kali	Adanya skala prioritas dalam melaksanakan kegiatan pengamanan hutan dan peredaran hasil .	Melaksanakan sinergitas antara petugas di KPH lingkup Dishut Prov.Jambi dengan Petugas Dishut Prov.Jambi.		
			Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan TIPIHUT	2 Kali	2 Kali	Dimasa Pandemi Covid-19 kegiatan tatap muka dikurangi (sosialisasi peraturan TIPIHUT)	Dialihkan kegiatan yang bersifat bukan pengumpulan massa.		
			Jumlah Pelaksanaan Pemasangan Papan Larangan	10 Unit	10 Unit	Adanya rasionalisasi anggaran dimasa pandemic covid 19	Kegiatan dilaksanakan menggunakan anggaran kegiatan patrol kebakaran hutan dan lahan.		

			TIPIHUT					
			Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan TIPIHUT	12 Bulan	12 Bulan	Kurang luasnya sarana untuk penyimpanan nbarang bukti temuan dan barang bukti sitaan.	Koordinasi dengan Rumah titipan sitaan negara (RUMBASAN). Koordinasi dengan kejaksaan, Polda Jambi, dan PN.	
		Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai Dampak Perusakan Hutan	Jumlah Pelaksanaan temu Penyuluh Kehutanan	1 Kali	1 Kali	-	-	
			Jumlah Lomba Wanalestari yang terlaksana	1 Kali	1 Kali			
			Jumlah Pelaksanaan/Monev /Supervisi Penyuluhan Kehutanan	11 Kali	11 Kali			
			Jumlah Pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapang yang	2 Kegiatan	2 Kegiatan			

			difasilitasi oleh Penyuluh Kehutanan					
			Jumlah Fasilitas Peningkatan Kelas KTH	2 Kelompok	2 Kelompok			
			Luas Demplot Tanaman Kehutanan yang difasilitasi Penyuluh	3 Ha	3 Ha			
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang terfasilitasi dalam kegiatan Temu Penyuluh	41 Penyuluh Kehutanan	41 Penyuluh Kehutanan			
		Evaluasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Provinsi Jambi	Jumlah Pemegang IPPKH/ Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan yang di Monitoring dan di Evaluasi Pemenuhan Kewajibannya	1 Pemegang IPPKH	1 Pemegang IPPKH	-	-	

				Jumlah Permohonan IPPKH/ Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan yang dilaksanakan Orientasi/ Pemeriksaan Lapangannya	1 Permohonan IPPKH	1 Permohonan IPPKH			
		Fasilitasi Penanganan Konflik dalam Kawasan Hutan	Pendataan Potensi Konflik Tenurial pada Hutan Adat di Provinsi Jambi	4 Ha di Prov.Jambi	4 Ha di Prov.Jambi	-	-	Masih banyaknya konflik lahan yang terjadi membutuhkan perhatian serius dan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyelesaian konflik lahan itu terjadi dimana, berapa yang sudah selesai dan yang	

								tumpang tindih.
			Jumlah Penanganan Konflik yang Difasilitasi	6 Konflik	6 Konflik			
	Pemantapan Kawasan Hutan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Hutan untuk Terbangunnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Kawasan Hutan	6 UPTD KPHP	6 UPTD KPHP				
	Konservasi Kawasan Esensial (bernilai Ekosistem Penting) dan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Identifikasi Kawasan Esensial di Provinsi Jambi	11 KPH	11 KPH	-	-		
		Rumah Anggrek	1 Unit	1 Unit				
	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan	5 Kali	5 Kali	Dalam masa pandemic Covid-19, pengurangan kegiatan-kegiatan yang bersifat tatap muka	Dialihkan ke Kegiatan yang sifatnya bukan pengumpulan Massa		

			Lahan Terbakar			(Sosialisasi pencegahan Karhutla dan Pembentukan MPA)		
			Jumlah Pelatihan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar	5 kali	5 kali			
			Jumlah Pelatihan Pembentukan MPA	2 kali	2 kali			
			Jumlah Monev SDM dan Sarana Prasarana Pengendalian Karhutla	10 kali	10 kali			
		Grouncheck Hotspot (Pengecekan Titik Panas) Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Pelaksanaan Grouncheck Hotspot dan Patroli dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	195 Kali	195 Kali	-	-	

		Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Media	4 Media	4 Media	Penyuluhan pencegahan karhutla di sekolah-sekolah ditiadakan karena tidak ada aktifitas belajar – mengajar	Pengalihan kegiatan ke Pemasangan / Penyebaran Poster dan Papan Larangan	
			Jumlah Pembuatan bahan Kampanye Karhutla (Brosur dan Kalender)	1500 lembar, 100 set	1500 lembar, 100 set			
			Jumlah Kampanye Pencegahan Karhutla di Sekolah-Sekolah	10 kali	10 kali			
		Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Pelaksanaan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	10 Kali	10 Kali	Minimnya terjadi karhutla di kawasan hutan diwilayah kerja KPHP dan TAHURA (Non Konsesi) sehingga pemadaman tidak terserap untuk dilaksanakan	Dialihkan ke Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Areal Bekas terbakar (Konsesi dan Kawasan Hutan Lainnya)	
		Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan	1 set peralatan	1 set peralatan	-	-	

			Kebakaran Hutan dan Lahan	Sarana Prasarana Penunjang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	kelengkapan pompa	kelengkapan pompa			
			Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Kerinci Unit I	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	11 Kali	11 Kali	-	-	
			Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	6 Kali	6 Kali	Kurangnya jumlah personil Polisi Kehutanan dan PPNS Kehutanan	Kekurangan personil polhut dibantu oleh staf dan penyuluh	
							Sarana Kendaraan Roda 4 (empat) untuk Operasional/ Patroli belum ada	Memaksimalkan kegiatan dengan kendaraan Roda 2 (dua)	
							Dukungan Anggaran	Melakukan kerjasama	

						yang belum memadai	dengan NGO yang bergerak di bidang konservasi sumber daya hutan dan mengusulkan anggaran ke Dinas Kehutanan Provinsi	
		Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	11 Kali	11 Kali	-	-	
		Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	11 Kali	11 Kali	Kendala pengajuan pertriwulan yang tidak sesuai dengan perencanaan	Telah diupayakan pengajuan kegiatan tepat waktu	
							Koordinasi bagian keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	
		Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	1 Tahun	1 Tahun	Kendala Pengajuan Per Triwulan yang tidak sesuai dengan perencanaan	Telah diupayakan pengajuan kegiatan tepat waktu	
							Koordinasi bagian keuangan Dinas	

							Kehutanan Provinsi Jambi	
		Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Tebo Barat unit IX	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	8 Kali	8 Kali	Akses menuju areal kerja cukup ekstrim	Diperlukannya sarana dan prasarana transportasi yang memadai (Kendaraan Medan Berat)	
						Data luasan kebakaran hutan masih belum maksimal	Diperlukan peralatan pemetaan penghasil data	
		Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	10 Kali	10 Kali	Adanya wabah Covid-19, tebatasnya dana, kendaraan operasional yang kurang dan jarak yang jauh serta sulit untuk dijangkau	Perlu ditambahkan dana pada kegiatan Pengamanan Hutan Patroli Pengamanan Kawasan dan Sekalian Patroli Pencegahan Kebakaran dalam Kawasan	
		Pengamanan Hutan dan Perlindungan	Jumlah Patroli Pengamanan	10 Kali	10 Kali	Alokasi Anggaran Pengamanan Hutan dan	Memadukan kegiatan dengan bantuan	

		Hutan di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Hutan dan Peredaran Hasil Hutan			Perlindungan Hutan dirasakan	operasional Dinas Kehutanan	
						Satuan Biaya harian untuk perjalanan dinas sangat minim mengingat lokasi secara geografis yang jauh dan berat	Mengusulkan standar harga satuan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (Program dan Evaluasi) agar operasional lebih optimal dan realistis	
						Perjalanan dinas luar daerah bergeser tata waktunya dari rencana karena kondisi pandemi COVID-19	Perjalanan dinas luar daerah telah terlaksana pada bulan November 2020	
		Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	9 Kali	9 Kali	Karena dana yang terbatas, patrol tidak bias dilakukan terlalu lama (berhari-hari) dan juga menjadi keterbatasan dalam melaksanakan patrol di daerah yang jauh dan sulit dijangkau	Agar dapat disediakan tambahan/ lebih banyak dana agar patroli dapat berjalan lebih efektif	
		Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Tanjung	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	1 Tahun	1 Tahun	Pelaksanaan kegiatan telah terealisasi target kinerja 6 kali patrol (100%) hanya saja ada		

			Jabung Timur Unit XIV					sisa dana yang tidak terserao sebesar Ro. 1.586.000,- dari Pos Belanja Makan dan Minum Sosialisasi atau Penyuluhan karena adanya himbauan dilarang memobilisasi masyarakat di masa pandemic Covid-19		
			Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV,XVI dan XVII	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	10 Kali	10 Kali		Kurangnya SDM pada kegiatan Patroli Pengamanan Hutan	Perlunya penambahan SDM pada kegiatan Patroli Pengamanan Hutan	
								Terbatasnya kendaraan roda dua dan kendaraan dinas operasional kondisinya tidak memadai untuk kegiatan patrol dilapangan Tidak tersedianya dana untuk pengangkutan barang bukti pada kegiatan ilegallogging	Adanya alokasi penganggaran pada sarana dan prasarana untuk kegiatan Patroli Pengamanan Hutan beserta kegiatan-kegiatan lainnya (dana pengangkutan barang bukti kegiatan ilegallogging, dan pendukung pengamanan hutan	

						Adanya pemangkasan anggaran karena wabah covid-19	dan perlindungan hutan	
		Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD Tahura	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	11 Kali	11 Kali	Terdapat peralatan pemadaman rusah/ kurang baik	Tidak terjadi Kebakaran dalam kawasan TAHURA	
						BBM, Pelumas Kendaraan Operasional dan Mesin Pemadam		
						Untuk menjangkau lokasi membutuhkan kendaraan air	Dengan menggunakan kendaraan air masyarakat / sewa	
						Tidak ada pos jaga untuk pengawasan wilayah Desa Gedong Karya, Jebus, Sungai Aur dan Kelurahan Simpang	Melakukan pengecekan ke Lokasi yang dianggap rawan/ informasi dari masyarakat sekitar	
						Dari informasi dilapangan ditemukan alat berat di Wilayah Kelurahan	Berdasarkan survey lapangan ditemukan pelaku dan	

						Simpang milik masyarakat Desa Sungai Aur bersama dengan Masyarakat Desa Rasau memasukkan Alat Berat untuk pembuatan parit didalam kawasan hutan	memberikan penjelasan serta menindak tegas dengan memerintahkan kepada pelaku untuk mengeluarkan alat berat tersebut	
							Pemanggilan terhadap pelaku dan memerintahkan tidak boleh memasukkan alat berat kedalam Kawasan	
							Pelaku menyampaikan usulan daftar nama masyarakat yang memiliki kebun disekitar TAHURA	
						relatif kecil dibandingkan luas wilayah kerja KPH sebesar 180.000 Ha (2 Unit)	Provinsi dalam rangka penang gulangan KARHUTLA	
		Pembuatan Bibit/Benih	Jumlah Pengadaan	10.000 batang	Tersedianya bibit			

			Tanaman Kehutanan	Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan		tanaman hutan sebanyak 10.000 batang terdiri dari: Kemiri, tembesu, Bulian (Ulin), Mangga, Kelengkeng, Durian Daun, Tempunik, T ampoi			
			Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah IPPKH yang difasilitasi untuk RHL	5 Izin	5 Izin	-	-	
				Jumlah Pengendalian RHL	12 UPTD (KPHP dan Tahura)	9 UPTD	Dana sangat minim sekali sehingga kegiatan tidak dapat dilakukan seluruhnya	Koordinasi dan komunikasi melalui Telepon /WA dengan UPTD KPHP	
			Monitoring Pengelolaan Daerah	Jumlah Lokasi Kegiatan Monev	11 UPTD KPHP	11 UPTD KPHP	-	-	

		Aliran Sungai (DAS)	Pengelolaan DAS Provinsi Jambi					
		Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Kerinci Unit I	Jumlah Luas Pemeliharaan Tahun I	5 Ha	5 Ha	-	-	
		Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Jumlah Luas Pemeliharaan Tahun I	5 Ha	5 Ha	Jauhnya lokasi kegiatan dengan akses jalan yang minim dan sulit ditempuh dengan kendaraan roda 4 (empat) menjadi kendala dalam pendistribusian bibit ke lokasi kegiatan	Melibatkan kelompok masyarakat pengelola lokasi (LPHD) dalam membantu pendistribusian bibit dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua)	
						Dukungan anggaran yang belum memadai	Melakukan monitoring dan pengawasan pertumbuhan tanaman pemeliharaan dengan masyarakat pengelola lokasi (LPHD) secara swadaya	
		Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI	Jumlah Luas Pemeliharaan Tahun I	5 Ha	5 Ha	-	-	

		Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Jumlah Luas Pemeliharaan Tahun I	5 Ha	5 Ha	Volume bibit sulaman melebihi 10% sehingga pelaksanaan kegiatan harus menunggu pengesahan APBD	Telah diupayakan pengajuan kegiatan setelah disahkan APBD 2020 Provinsi Jambi	
							Koordinasi Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	
		Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Jumlah Luas Pemeliharaan Tahun I	5 Ha	5 Ha	Kendala Cuaca /Iklim	Telah diupayakan pengefektifan dan efisiensi pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
							Koordinasi bagian keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	
		Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Jumlah Luas Pemeliharaan Tahun I	5 Ha	5 Ha	Pekerjaan berupa penyulaman baru dapat dilaksanakan pada bulan Oktober	Penyulaman dilaksanakan pada musim penghujan, agar tingkat kematian tanaman dapat diminimalisir	

		Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Jumlah Luas Pemeliharaan Tahun I	5 Ha	5 Ha	Adanya wabah COVID-19 dan Musim Panas diawal tahun	Patroli pengamanan kawasan dan patrol pencegahan kebakaran kawasan.	
		Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Jumlah Luas Pemeliharaan Tahun I	5 Ha	5 Ha	Alokasi Anggaran pemeliharaan tanaman RHL seluas 5 Ha dirasakan relatif kecil disbanding kan kondisi tana man yang masih relatif kecil (tanaman muda)	Perlu ada usulan kembali pekerjaan pemeliharaan tanaman tahun berikutnya agar tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan baik	
						Pekerjaan pemeliharaan tanaman lazimnya dan berdasarkan Rantek seyogyanya dilakukan sampai dengan tahun ke-3 (tga) untuk mencapai keberhasilan namun dalam usulan belum diakomodir	Untuk sementara kegiatan pemeliharaan dapat dibantu secara mandiri oleh KTH Tata Buana sebagai mitra karena terdapat tanaman MPTS/HHBK	
		Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Muaro	Jumlah Luas Pemeliharaan Tahun I	5 Ha	5 Ha	Dikarenakan lokasi demplot RHL yang berada di lahan gambut, Areal Demplot RHL	Dilaksanakan patrol pengamanan dan perlindungan hutan untuk menjaga lokasi	

		Jambi Unit XIII				sangat rawan akan kebakaran hutan dan lahan	demplot agar terhindar dari kebakaran hutan dan lahan	
		Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit xiv	Jumlah Luas Pemeliharaan Tahun I	5 Ha	5 Ha	-	-	
		Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Jumlah Luas Pemeliharaan Tahun I	5 Ha	5 Ha	Kendaraan Operasional kurang memadai dan dana upah tenaga kerja harian yang masih minim Jalan ke Lokasi sulit dilalui serta ongkos untuk melangsir bibit terlalu mahal Keterbatasan SDM	Diperlukan anggaran serta sarana dan prasarana dan upah tenaga kerja harian yang cukup memadai untuk kegiatan rehabilitasi kawasan hutan	
		Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD Tahura	Jumlah Luas Pemeliharaan Tahun I	25 Ha	25 Ha	Rapat Teknis Penyusunan Rantek	Melaksanakan rapat teknis lingkup UPTD Tahura dan mengundang Tim	

								Teknis Bidang DAS dan RHL.	
								Undangan rapat teknis Penyusunan Rantek dari Bidang DAS dan RHL.	
							Kondisi Lokasi	Dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi lokasi secara langsung Menyiapkan peta kerja	
							Merupakan areal bekas terbakar	Luas tutupan lahan bertambah 25 ha di wilayah Kelurahan Tanjung Kec.Kumpeh Kab.Muaro Jambi.	
							Musim Hujan akses ke lokasi membutuhkan kendaraan untuk medan berlumpur/tergenang air hutan.	Menggunakan kendaraan operasional 1 unti roda 4 dan 1 unit roda 2.	
							Mobilisasi pada saat musim hujan.		

1.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Kebijakan Strategis

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Jambi	7. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 9. PermenLHK Nomor P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial 10. Perdirjen PSKL No. 14 Tahun 2016 tentang Pokja PPS	Penyelesaian konflik tenurial melalui skema Perhutanan Sosial dan mempercepat proses pengusulan perhutanan sosial ke Kementerian
	Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Jambi	1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	Penyelesaian berbagai kasus konflik sosial termasuk konflik dalam kawasan hutan dan Hutan Adat di Provinsi Jambi yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari lintas instansi/institusi

		<p>Pemerintah Daerah</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial</p>	
2.	<p>Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif,</p>	<p>a. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Acara Pidana (KUHAP)</p> <p>b. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</p> <p>c. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>d. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang</p>	<p>Diharapkan pengelolaan hutan berjalan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya serta tegaknya hukum di bidang Kehutanan, sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi serta memonitoring dan mengevaluasi sebagai upaya pengawasan pelaksanaan yang dilakukan agar sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan menentukan langkah – langkah perbaikan untuk</p>

	bijaksana, terbuka, professional serta bertanggung jawab	<p>Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan</p> <p>e. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan</p>	masa yang akan datang
3.	<p>Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 2020</p> <p>Permohonan</p>	<p>1. PermenLHK No. P.32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</p> <p>2. PermenLHK No. P.9 Tahun 2018</p>	<p>Menghadapi ancaman karhutla di musim kemarau Tahun 2020</p> <p>Areal konsesi/izin</p>

Evaluasi Izin Konsesi kepada Menteri LHK RI yang berulang kali Terdampak Karhutla dan Illegal Logging	tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Karhutla	perusahaan sector kehutanan yang berulang kali terdampak karhutla dan <i>illegal logging</i>
Penetapan Personil Satgas Siaga Darurat Karhutla Tahun 2020	3. Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Tertib organisasi dan administrasi dalam pengendalian karhutla
Pembentukan Brigdakarhutla di setiap UPTD KPHP	4. Pergub Jambi No. 31 Tahun 2016 tentang Juknis Perda No. 2 Tahun 2016	Kesiapan SDM dalam pengendalian karhutla
Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)		Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian karhutla
Pelaksanaan Apel Siaga dan Pelatihan Bersama Pengendalian Karhutla Tahun 2020		Kesiapan semua stakeholder dalam menghadapi ancaman karhutla di musim kemarau

3.3 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

Ada beberapa catatan yang di rekomendasikan oleh DPRD mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan, sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Agar dalam penyajian LKPJ tidak hanya menyampaikan	Tahun 2020 sudah kita penuhi bahwa	Untuk menampilkan secara faktual capaian kinerja yang terukur.

	keberhasilan capaian program dan kegiatan, tetapi harus di dukung dengan data yang lengkap dan rinci berapa target yang ditetapkan , bagaimana perbandingan dengan kondisi tahun sebelumnya dan dari mana saja potensi sumber PAD sektor kehutanan tersebut.	capaian keberhasilan sudah ditampilkan dengan data pendukung.	
2.	Masih banyaknya konflik lahan yang terjadi membutuhkan perhatian serius dan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyelesaian konflik lahan itu terjadi dimana, berapa yang sudah selesai dan yang tumpang tindih.	Konflik lahan yang terjadi di dalam Kawasan Hutan di Provinsi Jambi telah di fasilitasi penanganannya dengan serius oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Dari sejumlah kasus konflik tenurial Kehutanan yang terjadi, semua telah difasilitasi penyelesaiannya sesuai batas kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi (data terlampir)
3.	Dinas kehutanan perlu membuat kebijakan antisipatif dalam rangka mengurangi permasalahan yang muncul pada pelaksanaan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan terutama pada lokasi konservasi yang jauh dan penegakan hukum yang sangat lemah,		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Pos Jaga dan Portal di Tahura untuk akses keluar masuk orang. 2. Patroli Rutin. Pemasangan papan larangan 3 Peningkatan kapasitas SDM Polhut dan PPNS 4 Penambahan biaya operasional pengamanan. 5 Penambahan sarpras pengamanan. 6 Pembiayaan pemberkasan

	kurangnya sarana dan prasarana, anggaran patroli yang belum memadai dan kurangnya personil Polisi Hutan (Polhut)		perkara pro yustisi.
4	Dinas Kehutanan perlu membuat dan kebijakan langkah-langkahstrategis dan teknis bagaimana mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tahun-tahun yang akandatang.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kegiatan pencegahan melalui sosialisasi, patroli, groundcheck Hotspot. 2. Fasilitasi penambahan jumlah kelompok MPA binaan sekitar kawasan hutan beserta sarpras. 3. Penempatan personil pada pos tertentu di daerah rawan karhutla 4. Penindakan/pro yustisi pelaku karhutla (biaya pemberkasan) 5. Tindakan tegas terhadap pemegang izin kehutanan. 6. Mendorong perlibatan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengalokasian Dana Desa untuk pencegahan karhutla sesuai Permendes.

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN (TP) DAN
PENUGASAN

4.1 Tugas Pembantuan

Dana Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berasal dari APBN melalui mekanisme Tugas Pembantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, dengan total dana sebesar Rp.7.600.000.000,-. Tujuan dari kegiatan ini adalah pemulihan ekosistem kawasan gambut dan pemanfaatan gambut secara bijaksana sesuai dengan daya dukungnya melalui pembangunan Infrastruktur pembasahan gambut berupa sekat kanal, Pemeliharaan IPG sumur bor dan sekat kanal supaya berfungsi normal, Revitalisasi ekonomi masyarakat pada daerah-daerah terdampak dan yang peduli terhadap kerusakan gambut dan revegetasi berupa demplot untuk menutupi lahan gambut yang kritis. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 7.321.443.489,- atau sebesar 96,33 %.

4.2 Permasalahan/ Hambatan

Di dalam melaksanakan kegiatan ada beberapa masalah yang dihadapi selama tahun anggaran yaitu :

1. Kegiatan Perbaikan sekat kanal dan Kegiatan Sumur Bor terlambat di realisasikan karena adanya Pandemic Covid 19.
2. Tidak sesuainya jumlah anggaran (minim) untuk pemeliharaan dengan jumlah IPG yang akan dipelihara atau diperbaiki.

Upaya mengatasi masalah / hambatan yang dihadapi :

1. Melaksanakan koordinasi ke pusat terutama ke Badan Restorasi Gambut.
2. Melaksanakan revisi anggaran beberapa kali untuk menyesuaikan situasi dan kondisi.

BAB V

P E N U T U P

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 ini disusun, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah, target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020.

LKPJ ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020.

Dengan adanya LKPJ ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari tujuan dan sasaran Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Jambi, Januari 2021

Kepala Dinas

AKHMAD BESTARI, SH.,MH
Pembina Utama Muda/ IV.c
19740508 199903 1 004

Lampiran Jawaban Untuk DPRD

No	Nama Konflik	Lokasi			Desa	Luas Usulan	Progres	Pendamping
		KPH	KAB	KEC				
1	Konflik antara PT. AAS dan PT. WN dengan Masy. Dusun Kunangan Jaya II Desa Bungku	Batanghari	Batanghari	Bajubang	Bungku	-	Proses Oleh PKTHA KLHK-RI (Telah dilaksanakan Verifikasi Subjek dan Objek)	-
2	PT. Samhutani dengan Masy. Ladang Panjang	Sarolangun	Sarolangun	Pauh	Ladang Panjang	3.000	Proses Oleh PKTHA KLHK-RI (Akan dilaksanakan rekonstruksi batas dan sebelumnya PKTHA Menyurati kepala BPKH Wil. XIII Pangkal Pinang)	-
3	PT. WKS dengan KT Sumber Makmur II	Tanjab Timur	Tanjab Timur	Geragai	Pandan	250	Proses Oleh PKTHA KLHK-RI (Telah dilaksanakan Verifikasi Subjek dan Objek)	LP2LH
4	PT. TMA dengan Masyarakat Sungai Abang	Tebo	Tebo	VII Koto	Sungai Abang	150	Proses Oleh PKTHA KLHK-RI (Telah dilaksanakan Verifikasi Subjek dan Objek)	-
5	TNBD dengan SAD	Sarolangun	Sarolangun	-	-	-		-
6	Konflik PT. WKS dengan SAD	Batanghari	Batanghari	-	-	200	Proses Oleh PKTHA KLHK-RI (Fasilitasi Mediasi)	LP2LH
7	PT. WKS dengan Sungai Landai Bersatu	Tebo	Tebo	-	Lubuk Mendarsah	2000	Proses Oleh PKTHA KLHK-RI telah dilaksanakan Identifikasi lokasi KT. SLB pada Areal PT. WKS (Distrik 8)	-
8	Konflik antara Koperasi Bersatu Arah Maju dengan KTH Karya Makmur	Muaro Jambi	Muaro Jambi	Sei. Gelam	-	360	Menunggu fasilitasi Timdu Kab, Muaro Jambi MoU Tanggal 20 November	-

							2019	
9	Konflik Antara PT. WKS dengan SMB	Batanghari	Batanghari	Mersam	Sengkati	40.820	Penyelesaian konflik melalui Timdu Provinsi	Muslimin
10	Konflik PT. WKS dengan KT Usaha Bersama	Tanjab Barat	Tanjab Barat	Muara Papalik	Papuah	300	Proses oleh PKTHA KLHK-RI On Progres	HKTI
11	Konflik PT. WKS dengan KT Maju Bersama	Tanjab Barat	Tanjab Barat	Merlung	Lubuk Terap	550	Proses oleh PKTHA KLHK-RI On Progres	HKTI
12	Konflik PT. Rudy Agung Laksana dengan KT Sungai Bungin	Tanjab Barat	Tanjab Barat	Muara Papalik	Dusun Mudo	835,5	Gakum KLHK-RI Menunggu Koordinasi Gakum	NU
13	PT. MAJI dengan KTH Semoga Lestari	Tanjab Timur	Tanjab Timur	Geragai	Lagan Tengah	143	Sedang ditangani oleh Tim Penyidik Dishut dan POLDA	NU
14	TNBS dengan Desa Sungai Gambut	Tanjab Timur	Tanjab Timur	Sadu	Sungai Rambut	2.376	Proses oleh PKTHA KLHK-RI On Progres	Prana
15	TNBS dengan Desa Remau Bako	Tanjab Timur	Tanjab Timur	Sadu	Remau Bako	1.674	Proses oleh PKTHA KLHK-RI On Progres	Prana
16	TNBS dengan Desa Sungai Cemara	Tanjab Timur	Tanjab Timur	Sadu	Sungai Cemara	2.627	Proses oleh PKTHA KLHK-RI On Progres	Prana
17	TNBS dengan Desa Air Hitam Laut	Tanjab Timur	Tanjab Timur	Sadu	Air Hitam Laut	4.423	Proses oleh PKTHA KLHK-RI On Progres	Prana
18	Konflik PT. REKI dengan Kelompok SPI dan SAD	-	-	-	Sei Jerat	300	Proses oleh PKTHA KLHK-RI telah dilaksanakan Identifikasi dan Verifikasi	SPI
19	Konflik PT. Mugitriman dengan KUD	-	-	-	-	801	Proses oleh PKTHA KLHK-RI On Progres	-
20	Konflik PT. REKI dengan Masyarakat Alam Sakti dan Tanjung Mandiri	-	-	-	-	3.130	Proses oleh PKTHA KLHK-RI telah di petakan lokasi yang diusulkan	-
21	Konflik KPHP Sarolangun	Sarolangun	Sarolangun	Limun	Suka Damai	-	Proses oleh PKTHA KLHK-	-

	Limau dengan SAD						RI telah dilakukan identifikasi dan pemetaan subjek dan objek SAD	
22	Konflik PT. WKS dengan Kelompok Maju Jaya	Tebo	Tebo	Engah Hilir	Muara Kilis	1.177,63	Proses oleh PKTHA KLHK-RI on Progres	Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan
23	Konflik PT. AAS dengan Masyarakat 12 Desa Mandiangin	Sarolangun	Sarolangun	Mandiangan	-	4.057	Proses oleh PKTHA KLHK-RI telah dilaksanakan Identifikasi dan Verifikasi	SP3LH
						76.318,13		

4.2.2. Kehutanan

4.2.2.1. APBD

Alokasi anggaran bidang kehutanan dari APBD Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 73.328.555.660,56,- dengan rincian Belanja tidak langsung sebesar Rp. 57.344.187.169,56,- realisasi sebesar Rp. **50.710.562.350,-** atau **83,55 %** dan Belanja Langsung sebesar Rp. 15.984.368.491,00,- untuk mendanai 9 Program dan 103 kegiatan, realisasi Rp. **21.341.279.398,-**. Atau **92,86 %**. Berikut ini dijabarkan uraian program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program

A. Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan.

Program pemberdayaan sumber daya hutan bertujuan agar mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan aspek lingkungannya. Total dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 777.209.000,- realisasi Rp. **2.041.899.890,-** atau sebesar **93,10 %** sedangkan realisasi fisik **95,89 %**.

Capaian kinerja program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan :

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
.	Kehutanan	Dinas Kehutanan							
1..				Pengembangan Hutan Tanaman	4 IUPHHK-HTI				
2.				Pendampingan kelompok usaha perhutanan sosial	10 PS 5 Pemegang Izin PS 10 Kelompok PS				
3.				Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	4 HT/HA Industri dan Hutan Hak. PNBP 100 %				
				Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan.	4 IUPHHK				
				Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	1 Pemohon 1 Izin HHBK 1 UPTD KPHP				

				Pemanfaatan dan pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit I Kerinci	2 Kelompok 4 kali 1 Kasus				
				Pemanfaatan dan pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit II dan III Bungo	2 Kali 2 kali 1 kali 1 kali				
				Pemanfaatan dan pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit IV, V dan VII Merangin	5 kali 2 kali 2 Kegiatan 1 berkas				
				Pemanfaatan dan pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	1 Laporan				
				Pemanfaatan dan pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	8 Izin				
				Pemanfaatan dan pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat	4 Izin 2 Izin				
				Pemanfaatan dan pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit X Tebo Timur	3 kali 5 kali 2 kali				
				Pemanfaatan dan pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari	3 Laporan 3 Laporan 1 Kemitraan 1 Laporan				
				Pemanfaatan dan pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XI dan XIII Muaro Jambi	5 Industri 5 Industri 5 Industri				

				Pemanfaatan dan pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	2 Kelompok 5 Kali 2 Kelompok				
				Pemanfaatan dan pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XI dan XV, XVI, XVII Tanjung Jabung Barat	2 Kali 2 Kali 1 Kali				
				Pemanfaatan dan pengembangan Potensi Hasil Hutan di UPTD Tahura	1 Kemitraan				

Keberhasilan dari program ini adalah

- a. Realisasi HTI (PT. Wanamukti Wisesa, PT. Samhutani, PT. HAN, PT. Gading Karya Makmur, PT. Indomas Pratama .1 RE (PT.REKI), 2 HPH (PT. Putra Duta Indah Wood dan PT. Pesona Belantara Persada)
- b. Pembinaan terhadap 5 pemegang ijin Perhutanan Sosial dan Monev terhadap 10 Pemegang ijin HTR, HKm dan HD
- c. SLVK pada industri 5 IUPHHK-HA dan Hutan Hak
- d. 6 Pemegang ijin HT/HA dan Hutan Hak
- e. Penerimaan PNBPNBP : - PSDH = Rp. 43.726.332.174,00 dan - DR = Rp. 13.317.800.731,00
- f. 1 kali bintek dan sosialisasi SI-PNBPNBP
- g. 3 sidang dan lelang di 3 Kabupaten (Muaro Jambi, Merangin dan Kota Jambi)
- h. 1 Kali sosialisasi
- i. 8 IUPHHK
- j. Fasilitasi 10 ijin HHBK di 3 Kabupaten (Bungo 1 ijin, Batanghari 3 ijin dan Sarolangun 6 ijin)
- k. Pengadaan alat pengolahan asap cair 5 Unit di KTH Bukt Lumut Desa Tamiai di Wilayah UPTD KPHP Kerinci Unit I
- l. Pengadaan alat pengolah madu sebanyak 9 unit KTH Jaya Abadi Desa Kebun Baru di Wilayah UPTD KPHP Kerinci Unit I
- m. Pengadaan stup madu sebanyak 56 unit KTH Manis Salang Merindu di Desa Punai Merindu di Wilayah UPTD KPHP Kerinci Unit I
- n. Pengadaan alat Pemotong Stik Kayu Manis 2 unit KTH Karya Usaha an KTH Harapan Jaya Desa Suko Pangkat di Wilayah UPTD KPHP Kerinci Unit I

- o. Pengadaan alat Pemotong Stik Kayu Manis 1 unit di Wilayah UPTD KPHP Kerinci Unit I
- p. Monev Fasilitas PNB dan PAD Sektor Kehutanan
- q. Pengembangan dan pengujian sebanyak 2 kasus
- r. Pemantauan PNB dan PAD , Perizinan dan fasilitasi kerjasama kemitraan kehutanan pada 11 UTD KPHP di Provinsi Jambi

B. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Total dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar Rp 3.747.463.247,-, secara garis besar tujuan dari kegiatan ini adalah terjaganya kelestarian hutan dan pemanfaatannya secara maksimal sebagai fungsi hidrologis, ekosistem dan iklim. Realisasi keuangan atas program ini adalah sebesar Rp. 3.228.919.602,- atau sebesar 86,16 %, sedangkan fisik 95,45 %. realisasi keuangan dan tidak lanjut perkegiatan sebagai berikut :

Capaian kinerja program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan :

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
.	Kehutanan	Dinas Kehutanan							
1..				Perencanaan Kegiatan Pengelolaan KPH, KPHL	0 Peta 1 Dokumen				
2.				Perluasan Akses Layanan Informasi Pemasaran Hasil HutanI	2 kali Pameran				
				Pemantapan dan Evaluasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca	2 Kali 1 Kali				
				Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit 1 Kerinci	6 Sistem Informasi				
				Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit II dan III Bungo	1 Dokumern 1 Laporan				
				Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin	1 Paket 1 Kali				

				Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	1 Laporan				
				Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	2 Izin				
				Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat	2 Izin 1 Desa 1 Izin				
				Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit X Tebo Timur	1 Kali 1 Kali 3 Sistem Informasi				
				Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari	2 IUPHHK-PS 3 IUPHH-PS				
				Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi	2 IPPKH 2 Lokasi 1 Dokumen				
				Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	10 Km 1 kali				
				Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit Xv, xvi dan XVII Tanjung Jabung Barat	1 Kali 1 Kali				
				Pengelolaan Kawasan Hutan di UPTD Tahura	1 tahun				
				Pengelolaan Hutan Kenali	10 Ha	Taman Hutan Kenali seluas 10 Ha yang terpelihara	-		
						Tidak			

					1 Unit embung	teralisasi			
					Penerimaan Restribusi Daerah Rp.30.000,-	Realisasi Penerimaan per 16 Desember 2020 Rp.36.874.500,-	Pengurangan anggaran akibat pandemic Covid 19	Penghapusan dalam dokumen DPA 2020	

Keberhasilan dari program ini adalah :

- a. Pembuatan bibit Kehutanan sebanyak 60.000 Btg (Tanaman Hutan Kenali, Kota Baru Kota Jambi)Dokumen pengelolaan DAS Provinsi Jambi
- b. Pemeliharaan 10,25 Ha Taman Hutan Kenali di Kota Jambi
- c. Pembuatan Gazebo Mushola, taman tempat bermain ana-anak
- d. Pembinaan kegiatan RHL di 11 UPTD KPHP dan UPTD TAHURA (Kerinci, Kota Sungai penuh, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjab Barat dan Tanjab Timur) dan sosialisasi 1 kali.
- e. Pengecekan lokasi kegiatan RHL di 11 UPTD KPHP dan UPTD TAHURA (Kerinci, Kota Sungai penuh, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjab Barat dan Tanjab Timur)
- f. Monev Kegiatan RHL tahun 2018 dan kegiatan BRG tahun 2018 (Merangin, Tanjabbar, Tanjabtim, sarolangun, Tahura Orang Kayu Hitam)
- g. Penanaman seluas 144 Ha di 5 UPTD KPHP (Kerinci, Merangin, Bungo , Sarolangun Hulu dan Sarolangun Hilir) bersumber dari dana DAK
- h. Penanaman seluas 65 Ha di 11 UPTD KPHP dan 1 UPTD Tahura (Kerinci, Merangin, Bungo, Tebo Barat, Tebo Timur , Sarolangun Hulu, Sarolangun Hilir,

Batanghari, Muaro Jambi, Tanjab Barat dan Tanjab Timur) bersumber dari dana PSDH-DR

C. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

Total dana yang dianggarkan untuk program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan adalah sebesar Rp. 5.383.823.597,- secara garis besar tujuan dari kegiatan ini adalah terjaganya kelestarian hutan dan penurunan jumlah titik api akibat kebakaran hutan serta meningkatnya kesadaran masyarakat terutama sekitar kawasan hutan akan fungsi dan manfaat hutan. Realisasi keuangan atas kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.181.157.401,- atau sebesar 96,24 %. Sedangkan realisasi fisik 95,60 %.

Dalam rangka mendukung program ini telah dilaksanakan 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Adapun realisasi keuangan dan tidak lanjut perkegiatan sebagai berikut :

Capaian kinerja program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan:

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
.	Kehutanan	Dinas Kehutanan							
1..				Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	6 UPTD KPHP dan 7 Perusahaan	95 %	-		

2.				Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	10 Kali	10 Kali	<p>Sebagian lokasi Kawasan hutan ada yang ditambah/diopukasi oleh masyarakat. Adanya konflik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemegang izin dan masyarakat dengan masyarakat pendatang (eksodus).</p> <p>Adanya skala prioritas dalam melaksanakan kegiatan pengamanan hutan dan peredaran hasil .</p> <p>Dimasa Pandemi Covid-19 kegiatan tatap muka dikurangi (sosialisasi peraturan TIPIHUT)</p> <p>Adanya rasionalisasi anggaran dimasa pandemic covid 19</p> <p>Kurang luasnya sarana untuk penyimpanan nbarang bukti temuan dan barang bukti sitaan.</p>	<p>Melakukan patrol rutin, sosialisasi, mediasi serta penegakan hukum..</p> <p>Melaksanakan sinergitas antara petugas di KPH lingkup Dishut Prov.Jambi dengan Petugas Dishut Prov.Jambi.</p> <p>Dialihkan kegiatan yang bersifat bukan pengumpulan massa.</p> <p>Kegiatan dilaksanakan menggunakan anggaran kegiatan patrol kebakaran hutan dan lahan.</p> <p>Koordinasi dengan Rumah titipan sitaan negara (RUMBASAN).</p> <p>Koordinasi dengan kejaksaan, Polda Jambi, dan PN.</p>
					9 kali	9 kali		
					2 kali	2 kali		
					10 Unit	10 Unit		

					12 bulan	12 Bulan			
3.				Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai Dampak Perusakan Hutan	1 Kali 1 Kali 11 Kali 2 Kegiatan 2 Kelompok 3 Ha 41 Penyuluh Kehutanan	100%	-	-	
4.				Evaluasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Provinsi Jambi	1 Pemegang IPPKH 1 Permohonan				

					IPPKH				
				Fasilitasi Penanganan Konflik dalam Kawasan Hutan	4 Ha di Prov.Jambi 6 Konflik				
				Pemantapan Kawasan Hutan	6 UPTD KPHP				
				Konservasi Kawasan Esensial (bernilai Ekosistem Penting) dan Keanekaragaman Hayati	11 KPH 1 Unit				
				Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	5 Kali 5 kali 2 kali 10 kali	98,62%	Dalam masa pandemic Covid-19, pengurangan kegiatan-kegiatan yang bersifat tatap muka (Sosialisasi pencegahan Karhutla dan Pembentukan MPA)	Dialihkan ke Kegiatan yang sifatnya bukan pengumpulan Massa	
				Grouncheck Hotspot (Pengecekan Titik Panas) Kebakaran Hutan dan Lahan	195 Kali	100%	-	-	
				Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	4 Media 1500 lembar, 100 set 10 kali	99,43%	Penyuluhan pencegahan karhutla di sekolah-sekolah ditiadakan karena tidak ada aktifitas belajar – mengajar	Pengalihan kegiatan ke Pemasangan / Penyebaran Poster dan Papan Larangan	
				Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	10 Kali	100%	Minimnya terjadi karhutla di kawasan hutan diwilayah kerja KPHP dan TAHURA (Non Konsesi) sehingga pemadaman tidak terserap untuk dilaksanakan	Dialihkan ke Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Areal Bekas terbakar (Konsesi dan Kawasan Hutan Lainnya)	
				Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan	1 set peralatan kelengkapan pompa	100%	-	-	
				Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Kerinci Unit I	11 Kali				

				Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	6 Kali				
				Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI	11 Kali				
				Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	11 Kali				
				Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	1 Tahun				
				Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Tebo Barat unit IX	8 Kali				
				Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	10 Kali				
				Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	10 Kali				
				Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	11 Kali				
				Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	1 Tahun				
				Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV,XVI dan XVII	10 Kali				
				Pengamanan Hutan dan Perlindungan	11 Kali				

				Hutan di UPTD Tahura					
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

Keberhasilan dari program ini adalah :

- a. Patroli Pencegahan di Kecamatan Pemenang Barat, Bathin VIII, Limbur Lubuk Mengkuang, Sumay, Bram Hitam, Bajubang, Pondok Tinggi, Keliling Danau, Dendang, Tebo tengah, Perusahaan izin konsesi kehutanan
- b. 15 kali operasi pengamanan, Muaro Jambi = 8 kali, Tanjab Timur = 2 kali, Tanjab Barat = 3 kali, Tebo = 2 kali dan Bungo = 1 kali
- c. 8 kali koordinasi, 3 kali Tanjab Timur, 1 kali Merangin, 1 kali Batanghari, 1 kali Bungo, 1 kali Tebo dan 1 kali Kerinci
- d. Pembinaan dan Monev kinerja penyuluhan di 7 UPTD KPHP (Kerinci, Merangin, Bungo, Sarolangun Hilir Sarolangun Hulu Tebo Timur dan Tanjung Jabung Timur)
- e. Sekolah lapang pada 4 Kelompok Tani di UPTD KPHP Merangin, Bungo, Kerinci dan Sarolangun Hilir)
- f. Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi Jambi (8 kategori pemenang)
- g. Evaluasi dan orientasi pada 2 Pemegang ijin IPKKH, PT. PetroChina Int dan CV. Chandra Jaya (TanjabBar), Pinjam pakai kawasan hutan PU Sarolangun, Rencana Penggunaan Kawasan Hutan (Kerinci)
- h. 23 konflik tenurial di 10 Kabupaten dan 6 hutan adat di Kab. Kerinci
- i. Sosialisasi tata batas di 3 kab (Sarolangun, Tebo dan Tanjab Barat)
- j. Perencanaan KPHP di 7 Kabupaten (Tanjab Barat, tanjab Timur, Muaro Jambi, Batanghari, Tebo, Sarolangun dan Kerinci)
- k. Konservasi di 13 Lokasi Muaro Jambi 2 lokasi, Batanghari 1 lokasi, Tanjab Timur 2 lokasi, Tanjab Barat 1 lokasi, Sarolangun 3 lokasi, Merangin 1 lokasi, Bungo 1 lokasi, Tebo 1 lokasi dan Kerinci 1 lokasi
- l. Sosialisasi Karhutla di Kec. Sungai Gelam, Kumpeh Ulu, Pangkalan Jambu, Pengabuan dan Mandiangin
- m. Ground Chek hot spot Karhutla di Kec. Tabir barat, Betara, Tiang Pumpung, Jujuhan, Lembah Masurai, Cermin Nan Gedang, Desa Koto Tapus, Tanjung Dalam,
- n. Sosialisasi melalui Televisi, Radio, Online dan Surat Kabar
- o. Pemebentukan MPA di Desa Mekar Sari, Temengung, Pematang Kolim, Suka damai (Sarolangun), Desa Gedong Karya (Muaro Jambi), Kota Kandis, Dendang, Parit Culum II (Tanjab Timur), Desa Sungai Karang dan Napal Putih (Tebo) dan Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan (Kerinci)
- p. Pelatihan PLTB di Desa Tarikan, Renah Sungai Ipuh, Jangga Baru, Catur Rahayu, Bram Itam Raya, Terentang Baru, Renah Kayu Embun, Suo-Suo, Sungai Karang dan Desa Danau

- q. Patroli pencegahan karhutla di 11 Kab/Kota (Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Tebo, Bungo, Batanghari, Muaro Jambi, Sarolangun, Kota Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur)
- r. Patroli pencegahan karhutla di 9 Kab/Kota (Kerinci, Merangin, Tebo, Bungo, Batanghari, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjab Barat, Tanjab Timur)
- s. Monev Bekas karhutla di 4 desa (Catur Rahayu, Seponjen, Pemunyan dan Kelurahan Simpang)
- t. Pengadaan 1 unit Mobil
- u. Patroli dan pengamanan di 11 wilayah UPTD KPHP dan 1 UPTD Tahura

D. Program Perencanaan dan Pengembangan

Program Perencanaan dan Pengembangan dilaksanakan dengan total dana Rp. 1.569.315.600,-. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terwujudnya Kelompok usaha kehutanan yang produktif oleh masyarakat sekitar kawasan hutan dan pengembangan hutan adat Provinsi Jambi dengan realisasi sebesar Rp. 1.467.348.484,- atau sebesar 93,50 %. sedangkan realisasi fisik 97,65 % yang terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan yaitu :

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
.	Kehutanan	Dinas Kehutanan							
1.				Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	10.000 batang	Tersedianya bibit tanaman hutan sebanyak 10.000 batang terdiri dari; Kemiri, tembesu, Bulian (Ulin), Mangga, Kelengkeng, Durian Daun, Tempunik, Tampoi			
2.				Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	5 Izin 12 UPTD (KPHP dan Tahura)	5 Izin 9 UPTD	- Dana sangat minim sekali sehingga kegiatan tidak dapat dilakukan seluruhnya	Koordinasi dan komunikasi melalui Telepon /WA dengan UPTD KPHP	
3.				Monitoring Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	11 UPTD KPHP				
4.				Rehabilitasi Kawasan	5 Ha				

				Hutan di UPTD KPHP Kerinci Unit I					
5.				Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	5 Ha				
6.				Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI	5 Ha				
7.				Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	5 Ha				
8.				Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	5 Ha				
9.				Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	5 Ha				
10.				Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	5 Ha				
11.				Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	5 Ha				
12.				Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	5 Ha				
13.				Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit xiv	5 Ha				
14.				Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV,XVI dan XVII	5 Ha				
15.				Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD Tahura	1 Buku	Rapat Teknis Penyusunan Rantek	Melaksanakan rapat teknis lingkup UPTD Tahura dan mengundang Tim Teknis Bidang DAS dan RHL.	Undangan	

						<p>rapat teknis Penyusunan Rantek dari Bidang DAS dan RHL.</p> <p>Dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi lokasi secara langsung</p> <p>Menyiapkan peta kerja</p> <p>Kondisi Lokasi</p> <p>Semak belukar yang terbuka perlu dilakukan penanaman dengan jenis tambahan berguna sebagai koleksi tumbuhan di Tahura OKH.</p> <p>Luas tutupan lahan bertambah 25 ha di wilayah Kelurahan Tanjung Kec.Kumpeh Kab.Muaro Jambi.</p> <p>Menggunakan kendaraan operasional 1 unit roda 4 dan 1 unit roda 2.</p> <p>Merupakan areal bekas terbakar</p> <p>Musim Hujan akses ke lokasi membutuhkan</p>		
				25 Ha				
				0,10	Areal kegiatan merupakan terdapat semak belukar tinggi			

						kendaraan untuk medan berlumpur/tergenang air hutan.			
						Mobilisasi pada saatr musim hujan.			

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Solusi
1.	Perencanaan kegiatan Pengelolaan KPHP/KPHL	127.148.000	12.1235.500	- Tidak ada permasalahan	-
2.	Akses Pelayanan Informasi Pemasaran Hasil Hutan	109.944.000	109.944.000	- Tidak ada permasalahan	-
3.	Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Unit I Kerinci	77.164.000	76.229.900	- Tidak ada permasalahan	-
4.	Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP bungo Unit II dan III	73.882.000	73.679.440	- Tidak ada permasalahan	-
5.	Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI	99.514.000	94.450.000	- Tidak ada permasalahan	-
6.	Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	58.464.000	36.570.000	Lokasi sangat jauh dan kurangnya sarana dan prasarana	Pengadaan sarana dan prasarana
7.	Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Unit VII hilir sarolangun	74.564.000	74.490.036	- Tidak ada permasalahan	-
8.	Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP tebo barat Unit IX	128.088.000	122.119.488	- Tidak ada permasalahan	-
9.	Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP tebo timur Unit X	68.964.000	66.757.100	- Tidak ada permasalahan	-
10.	Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP batang hari Unit XI dan XII	86.878.000	75.407.500	- Tidak ada permasalahan	-
11.	Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP muaro jambi Unit XIII	78.128.000	78.128.000	- Tidak ada permasalahan	-
12.	Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP tanjung jabung timur Unit XIV	85.464.000	45.427.500	- Tidak ada permasalahan	-
13.	Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP tanjung jabung barat Unit XV,XVI dan XVII	87.464.000	80.374.020	Terbatasnya SDM dan Sarpras	Penambahan SDM dan sarpras
14.	Pengelolaan kawasan hutan di UPTD TAHURA	263.649.600	262.536.000	- Tidak ada permasalahan	-
15.	Pengelolaan hutan Kenali	150.000.000	150.000.000	- Tidak ada permasalahan	-

Keberhasilan dari program ini adalah :

- a. 1 kali mengikuti Pameran Nusantara di Yogyakarta dan 1 kali Pameran RCC di Jambi
- b. 4 kali pameran di Jakarta, Jambi dan Sungai Penuh
- c. 10 kali pameran di 10 UPTD KPHP dan penyusunan RPHJP di 11 UPTD KPHP

4.2.2.2. DANA DEKONSENTRASI (DEKON)

Program ini berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan total dana Rp. 330.800.000,- melalui dana APBN Tahun 2019. Tujuan dari kegiatan ini adalah terkoordinasikannya perencanaan dan evaluasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam wujud pengelolaan hutan yang baik. Realisasi keuangan atas kegiatan ini adalah sebesar Rp. 283.125.500,- atau sebesar 85,59 %. Sedangkan realisasi fisik 98,00 % yang terdiri 1 program yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan kegiatan Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi. Adapun output dari kegiatan tersebut adalah, Fasilitasi pengelolaan TAHURA, Biaya Operasional Penyuluh (BOP) kehutanan dan administrasi kegiatan.

4.2.2.3. DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP)

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, dengan total dana sebesar Rp. 35.946.841.000,- dari dana APBN Tahun anggaran 2019. Tujuan dari kegiatan ini adalah pengendalian dan pengelolaan kawasan gambut dengan fungsi untuk mengembalikan ekosistem kawasan gambut dan pemanfaatan gambut secara bijaksana sesuai dengan daya dukungnya. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 28.156.749.846,- atau sebesar 63,33 %. Kegiatan fisik restorasi gambut ini adalah Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG) berupa sekat kanal dan sumur bor, Revegetasi melalui penanaman dan Revitalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat pada kawasan hutan. Untuk realisasi fisik sekat kanal sebanyak 101 unit, sumur bor 180 unit, revitalisasi ekonomi sebanyak 12 paket.

Jambi, Januari 2021

KEPALA DINAS

AKHMAD BESTARI, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19740508 199903 1 004